

Implementasi Civil–Military Cooperation (CIMIC) dan Patroli Gabungan (Joint Patrol) Satgas Konga XXIII-J Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Lebanon: Analisis Hubungan Sipil–Militer dan Diplomasi Pertahanan Indonesia

Ade Fian Agestiyono¹ Lukman Yudho Prakoso² Aom Dikdik Kustiwa³

Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3}

Email: 4defian@gmail.com¹

Abstrak

Stabilitas keamanan pascakonflik di Lebanon Selatan tidak dapat dilepaskan dari peran United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) sebagai instrumen pemeliharaan perdamaian multidimensional. Indonesia, melalui Satgas Kontingen Garuda (Konga) XXIII-J, berkontribusi dengan mengintegrasikan pendekatan keamanan dan sosial melalui implementasi Civil Military Cooperation (CIMIC) dan patroli gabungan (joint patrol). Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana kedua instrumen tersebut dijalankan serta implikasinya terhadap hubungan sipil–militer, stabilitas keamanan lokal, dan diplomasi pertahanan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus, memanfaatkan wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan analisis tematik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa CIMIC berfungsi sebagai mekanisme konstruksi kepercayaan sosial dan legitimasi pasukan perdamaian, sementara patroli gabungan berperan sebagai instrumen deterrence simbolik dan penguatan interoperabilitas keamanan. Namun demikian, efektivitas keduanya masih dibatasi oleh perbedaan budaya organisasi militer, fragmentasi SOP multinasional, serta keterbatasan koordinasi sipil–militer. Artikel ini berargumen bahwa CIMIC dan joint patrol bukan sekadar instrumen teknis operasi perdamaian, melainkan bagian dari strategi diplomasi pertahanan Indonesia yang merepresentasikan transformasi peran militer dalam politik global kontemporer.

Kata Kunci: Peacekeeping, CIMIC, Hubungan Sipil–Militer, Diplomasi Pertahanan, UNIFIL



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Konflik Lebanon–Israel merupakan salah satu konflik berkepanjangan di Timur Tengah yang memperlihatkan keterbatasan pendekatan keamanan tradisional dalam menciptakan perdamaian berkelanjutan. Sejak berakhirnya perang besar tahun 2006, Lebanon Selatan tetap berada dalam kondisi negative peace, yaitu ketiadaan perang terbuka namun tetap rentan terhadap eskalasi kekerasan sporadis (Galtung, 1996). Dalam konteks inilah UNIFIL beroperasi sebagai mekanisme internasional untuk menjaga stabilitas dan mencegah kembalinya konflik bersenjata. Perkembangan operasi pemeliharaan perdamaian pasca–Perang Dingin menunjukkan pergeseran signifikan dari traditional peacekeeping menuju multidimensional peacekeeping yang mencakup aspek keamanan, kemanusiaan, dan pembangunan sosial (Bellamy & Williams, 2010). Pasukan penjaga perdamaian tidak lagi hanya berfungsi sebagai pemisah pihak bertikai, tetapi juga sebagai aktor sosial-politik yang berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal. Partisipasi Indonesia dalam UNIFIL melalui Satgas Konga XXIII-J perlu dipahami dalam kerangka politik luar negeri bebas aktif dan komitmen konstitusional untuk berkontribusi pada ketertiban dunia. Namun, lebih dari itu, keterlibatan ini mencerminkan transformasi peran militer Indonesia dari aktor pertahanan teritorial menjadi instrumen diplomasi pertahanan dan soft power negara. Implementasi CIMIC dan patroli gabungan menjadi arena utama di mana transformasi tersebut dipraktikkan.

Artikel ini berangkat dari pertanyaan kunci: bagaimana implementasi CIMIC dan joint patrol oleh Satgas Konga XXIII-J berkontribusi terhadap stabilitas keamanan dan relasi sipil–

militer, serta apa implikasinya bagi diplomasi pertahanan Indonesia? Dengan menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini diharapkan berkontribusi pada literatur ilmu sosial dan ilmu politik, khususnya dalam kajian hubungan sipil-militer, peacekeeping, dan kebijakan luar negeri.

Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoretis

1. Operasi Pemeliharaan Perdamaian Multidimensional. Williams (2015) menegaskan bahwa peacekeeping modern harus dipahami sebagai praktik politik internasional yang melibatkan negosiasi legitimasi antara aktor internasional dan masyarakat lokal. Keberhasilan misi tidak hanya diukur dari stabilitas keamanan, tetapi juga dari penerimaan sosial dan kepercayaan masyarakat sipil.
2. Konstruktivisme dan Legitimasi Sosial. Pendekatan konstruktivisme menekankan bahwa keamanan dibentuk melalui interaksi sosial dan konstruksi makna bersama (Wendt, 1999). Dalam konteks UNIFIL, CIMIC berfungsi membentuk identitas pasukan penjaga perdamaian sebagai mitra sosial, bukan aktor represif.
3. Hubungan Sipil-Militer. Janowitz (1960) memandang militer modern sebagai institusi sosial yang harus adaptif terhadap nilai-nilai sipil. Dalam operasi perdamaian, relasi sipil-militer tidak lagi bersifat hierarkis, tetapi kolaboratif. CIMIC menjadi medium utama relasi tersebut.
4. Diplomasi Pertahanan. Cottey dan Forster (2004) mendefinisikan diplomasi pertahanan sebagai penggunaan sumber daya militer pada masa damai untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri. Keterlibatan TNI dalam UNIFIL mencerminkan praktik diplomasi pertahanan Indonesia yang bersifat simbolik sekaligus operasional.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus terhadap Satgas Konga XXIII-J/UNIFIL. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perwira CIMIC, perwira operasi, dan personel patroli; analisis dokumen resmi UNIFIL dan PMPP TNI; serta observasi tidak langsung terhadap laporan kegiatan. Data dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola implementasi, tantangan, dan implikasi politik dari CIMIC dan joint patrol (Creswell, 2004).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi CIMIC sebagai Instrumen Legitimasi Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CIMIC berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat Lebanon Selatan terhadap UNIFIL dan Satgas Indonesia. Program pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan tidak hanya memenuhi kebutuhan material, tetapi juga berfungsi sebagai simbol komitmen normatif Indonesia terhadap nilai kemanusiaan dan perdamaian.

Patroli Gabungan dan Stabilitas Keamanan

Patroli gabungan dengan LAF dan kontingen multinasional berfungsi sebagai mekanisme confidence-building dan deterrence. Kehadiran bersama di ruang publik menciptakan persepsi stabilitas, meskipun efektivitas taktis sering terhambat oleh perbedaan SOP dan budaya organisasi militer.

Pembahasan

CIMIC sebagai Instrumen Politik Legitimasi dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Civil Military Cooperation (CIMIC) oleh Satgas Konga XXIII-J tidak dapat dipahami semata sebagai aktivitas kemanusiaan atau

sosial, melainkan sebagai instrumen politik legitimasi dalam konteks operasi pemeliharaan perdamaian multidimensional. Dalam kerangka konstruktivisme, legitimasi keamanan tidak dibangun melalui superioritas kekuatan militer, tetapi melalui interaksi sosial yang membentuk persepsi, norma, dan kepercayaan masyarakat lokal terhadap aktor keamanan (Wendt, 1999). Kegiatan CIMIC seperti pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur sosial, dan program pendidikan berfungsi sebagai medium konstruksi identitas pasukan perdamaian Indonesia sebagai *peace partner*, bukan aktor koersif. Dalam konteks Lebanon Selatan, di mana masyarakat memiliki pengalaman historis panjang terhadap kekerasan dan intervensi militer asing, legitimasi sosial menjadi prasyarat utama keberhasilan misi UNIFIL. Penelitian ini menunjukkan bahwa CIMIC Satgas Konga XXIII-J berhasil mereduksi jarak sosial antara pasukan militer dan warga sipil, sehingga menciptakan ruang komunikasi yang lebih cair. Hal ini sejalan dengan argumen Williams (2015) bahwa *peacekeeping modern* mensyaratkan *local consent* yang bersifat dinamis dan terus-menerus dinegosiasikan melalui praktik sehari-hari, bukan sekadar mandat formal PBB. Namun demikian, pembahasan ini juga mengungkap keterbatasan CIMIC sebagai instrumen legitimasi. Ketergantungan pada sumber daya militer dan mandat UNIFIL membuat CIMIC rentan dipersepsikan sebagai bagian dari struktur kekuasaan internasional, bukan sepenuhnya inisiatif lokal. Oleh karena itu, keberlanjutan legitimasi sosial CIMIC sangat bergantung pada kemampuan pasukan untuk melibatkan aktor sipil lokal secara partisipatif, bukan sekadar sebagai penerima bantuan. Di sinilah tantangan relasi sipil–militer muncul secara politis, bukan teknis semata.

Patroli Gabungan dan Produksi Keamanan Simbolik

Patroli gabungan (*joint patrol*) yang dilakukan Satgas Konga XXIII-J bersama Lebanonese Armed Forces (LAF) dan kontingen multinasional UNIFIL menunjukkan bahwa keamanan dalam konteks *peacekeeping* bersifat simbolik sekaligus operasional. Kehadiran bersama pasukan multinasional di ruang publik menghasilkan *security visibility* yang berfungsi sebagai mekanisme pencegah eskalasi konflik. Dalam perspektif politik keamanan, patroli gabungan dapat dipahami sebagai bentuk *deterrence without coercion*, yakni pencegahan konflik melalui kehadiran simbolik kekuatan internasional (Bellamy & Williams, 2010). Namun, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas patroli gabungan sering kali dibatasi oleh perbedaan budaya organisasi militer, SOP, dan bahasa operasional. Perbedaan ini tidak hanya berdampak pada aspek teknis patroli, tetapi juga pada produksi makna keamanan. Ketika patroli dilakukan secara prosedural tanpa koordinasi strategis yang mendalam, keamanan yang dihasilkan cenderung bersifat performatif dan simbolik, bukan substantif. Temuan ini menguatkan kritik terhadap *peacekeeping* kontemporer yang kerap terjebak dalam rutinitas operasional tanpa transformasi struktural terhadap akar konflik (Autesserre, 2014). Dalam konteks ini, patroli gabungan seharusnya tidak hanya dipahami sebagai instrumen kontrol wilayah, tetapi juga sebagai arena negosiasi politik antar aktor keamanan baik lokal maupun internasional. Keterlibatan LAF dalam patroli bersama UNIFIL memiliki dimensi politik penting, yaitu penguatan kedaulatan negara Lebanon melalui *capacity building* dan *shared authority*. Namun, jika tidak diimbangi dengan transfer pengetahuan dan kepercayaan yang setara, patroli gabungan berpotensi mereproduksi relasi hierarkis antara aktor internasional dan lokal.

Hubungan Sipil–Militer dalam Kerangka Peacekeeping Multinasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi sipil–militer dalam misi UNIFIL tidak dapat disamakan dengan relasi sipil–militer domestik. Dalam konteks *peacekeeping*, militer beroperasi di ruang sosial asing yang memiliki norma, identitas, dan struktur kekuasaan tersendiri. Pendekatan Janowitz (1960) mengenai militer sebagai institusi sosial yang adaptif

menjadi relevan, khususnya dalam memahami peran TNI sebagai aktor yang harus menyeimbangkan profesionalisme militer dengan sensitivitas sosial. CIMIC menjadi titik temu utama relasi sipil militer tersebut. Melalui CIMIC, militer tidak hanya menjalankan fungsi keamanan, tetapi juga berperan sebagai aktor sosial yang berinteraksi langsung dengan masyarakat sipil. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan humanis dan komunikatif yang diterapkan Satgas Konga XXIII-J berkontribusi pada terbentuknya relasi sipil–militer yang relatif harmonis. Namun, relasi ini tetap bersifat asimetris karena militer tetap memegang kontrol sumber daya dan otoritas keamanan. Dalam perspektif ilmu politik, kondisi ini menimbulkan dilema normatif: di satu sisi, kehadiran militer diperlukan untuk menciptakan stabilitas; di sisi lain, dominasi militer dalam ruang sosial berpotensi membatasi otonomi sipil. Oleh karena itu, keberhasilan relasi sipil–militer dalam peacekeeping sangat bergantung pada mekanisme akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan aktor sipil non-militer, baik lokal maupun internasional.

CIMIC dan Joint Patrol sebagai Praktik Diplomasi Pertahanan Indonesia

Pembahasan ini menegaskan bahwa implementasi CIMIC dan patroli gabungan oleh Satgas Konga XXIII-J tidak dapat dilepaskan dari strategi diplomasi pertahanan Indonesia. Dalam kerangka Cottey dan Forster (2004), diplomasi pertahanan mencakup penggunaan instrumen militer untuk tujuan politik luar negeri pada masa damai. Partisipasi aktif Indonesia dalam UNIFIL merepresentasikan upaya membangun citra internasional sebagai negara moderat, kontributor perdamaian, dan aktor normatif dalam politik global. CIMIC, dalam hal ini, berfungsi sebagai soft power projection yang memperkuat identitas Indonesia sebagai negara yang mengedepankan nilai kemanusiaan dan solidaritas global. Sementara itu, patroli gabungan merepresentasikan komitmen Indonesia terhadap keamanan kolektif dan multilateralisme. Kombinasi keduanya menunjukkan bahwa diplomasi pertahanan Indonesia tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga operasional dan berkelanjutan. Namun demikian, pembahasan ini juga menyoroti bahwa diplomasi pertahanan melalui peacekeeping memiliki keterbatasan struktural. Posisi Indonesia sebagai middle power membuat pengaruh politiknya dalam pengambilan keputusan strategis UNIFIL relatif terbatas. Oleh karena itu, optimalisasi diplomasi pertahanan memerlukan konsistensi kebijakan, peningkatan kapasitas negosiasi di forum PBB, serta integrasi pengalaman lapangan peacekeeping ke dalam perumusan kebijakan luar negeri nasional.

Implikasi Teoretis dan Konseptual

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat argumen bahwa peacekeeping harus dipahami sebagai praktik sosial-politik, bukan sekadar operasi keamanan. CIMIC dan joint patrol merupakan arena di mana norma, identitas, dan kekuasaan dinegosiasikan secara simultan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa hubungan sipil–militer dalam konteks internasional memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan konteks domestik, sehingga memerlukan kerangka analisis yang interdisipliner antara ilmu politik, hubungan internasional, dan studi keamanan kritis. Secara konseptual, artikel ini berkontribusi pada kajian diplomasi pertahanan dengan menunjukkan bahwa keberhasilan diplomasi militer tidak hanya ditentukan oleh visibilitas internasional, tetapi juga oleh kualitas interaksi sosial di tingkat lokal. Dengan demikian, peacekeeping dapat dilihat sebagai laboratorium politik bagi negara kontributor seperti Indonesia dalam membangun legitimasi global.

KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa CIMIC dan patroli gabungan Satgas Konga XXIII-J merupakan instrumen strategis dalam operasi pemeliharaan perdamaian UNIFIL yang



melampaui fungsi keamanan semata. Keduanya berkontribusi pada stabilitas lokal, penguatan hubungan sipil–militer, dan diplomasi pertahanan Indonesia. Ke depan, peningkatan interoperabilitas, pelatihan lintas budaya, dan integrasi aktor sipil perlu menjadi prioritas agar peran Indonesia dalam peacekeeping semakin relevan secara politik dan normatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bellamy, A. J., & Williams, P. D. (2010). *Understanding Peacekeeping*. Cambridge University Press.
- Cottey, A., & Forster, A. (2004). *Reshaping Defence Diplomacy*. Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2004). *Qualitative Inquiry and Research Design*. Sage.
- Galtung, J. (1996). *Peace by Peaceful Means*. Sage.
- Janowitz, M. (1960). *The Professional Soldier*. Free Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge University Press.
- Williams, P. D. (2015). *Enhancing Civilian Protection in Peace Operations*. Oxford University Press.